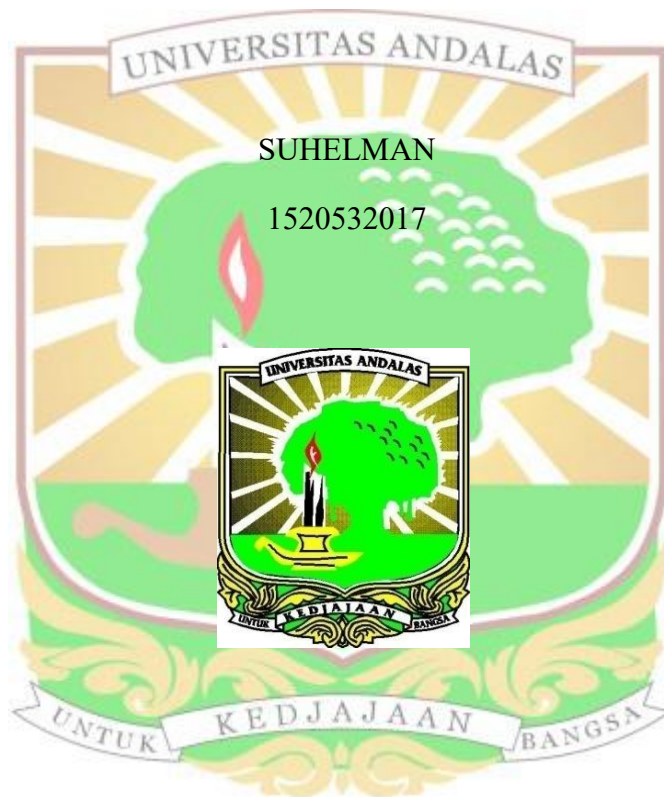


ANALISIS EVALUASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA BARAT

Tesis



Pembimbing 1: Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing 2: Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, Ak

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

ANALISIS EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI SUMATERA BARAT

Oleh: Suhelman (1520532017)

(Dibawah bimbingan: Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA dan
Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, Ak)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Barat. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan SPIP sehingga bisa merumuskan upaya yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan agar penyelenggaraan SPIP berjalan dengan baik. Variabel dalam penelitian ini adalah lima unsur SPIP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Penelitian ini merupakan studi kasus pada KPU di Sumatera Barat, yang terdiri atas satu KPU Provinsi dan 19 KPU kabupaten/kota. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penyelenggaraan SPIP pada KPU di Sumatera Barat sudah memadai. Namun dari lima unsur SPIP yang telah dilaksanakan, satu unsur penyelenggaraannya masih kurang memadai yaitu unsur penilaian risiko. Empat unsur SPIP lainnya yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya sudah memadai. Hambatan dalam pelaksanaan SPIP pada KPU di Sumatera Barat antara lain: 1) rentang kendali (*span of control*) yang terlalu jauh antara Inspektorat Jenderal KPU dengan KPU kabupaten/kota, 2) keterbatasan jumlah personel auditor pada Inspektorat Jenderal KPU, 3) anggaran untuk penyelenggaraan SPIP yang masih sangat kurang, dan 4) kurangnya supervisi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SPIP. Upaya yang harus dilakukan agar penyelenggaraan SPIP bisa berjalan dengan baik pada KPU di Sumatera Barat antara lain: 1) pembentukan badan tertentu sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Jenderal KPU di setiap KPU provinsi, 2) pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional auditor (JFA) melalui penyesuaian/*inpassing*, 3) melaksanakan seleksi CPNS untuk formasi jabatan fungsional auditor, 4) penambahan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan SPIP, dan 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP.

Kata Kunci: audit, *internal control*, KPU, pengendalian internal, SPIP

ANALYSIS EVALUATING THE IMPLEMENTATION
OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP)
IN GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) IN WEST SUMATRA

by: Suhelman (1520532017)
(Supervised by: Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA and
Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, Ak)

Abstract

This research aims to understand and evaluate the government internal control system (SPIP) on general election commission (KPU) in West Sumatra. The research also intend to know and comprehend barriers faced by KPU of in the implementation of SPIP so that we can formulate the efforts need to be taken by decision makers so that the implementation of SPIP going well. A variable in this research is five elements SPIP based on government regulation number 60 years 2008 namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of internal control. The research is a case study on KPU in West Sumatra, which is made up of a provincial KPU and 19 districts KPU. The data used to research this is the primary data was sourced from the questionnaire and the results of the interviews. The results of the study showed in general SPIP on the implementation of KPU in west Sumatra was adequate. But from five SPIP element that have been undertaken, one element is still inadequate namely risk Assessment. Four elements SPIP others are environment control, activities control, information and communication, and monitoring internal control, they are adequate. Obstacles in the implementation of the SPIP on KPU in West Sumatra among others: 1) span of control that are too far apart between general inspectorate KPU with KPU districts, 2) limited the number of personnel auditor in general inspectorate KPU, 3) lack of budget to implementation SPIP, and 4) lack of supervision, monitoring, and evaluating the implementation of SPIP. Efforts must be done so that the SPIP can run in properly in KPU in West Sumatra among others: 1) entity formation certain as the extension general inspectorate KPU in every KPU province, 2) the appointment civil servants in position functional auditor through adjustment/inpassing, 3) conducted a selection process of CPNS to formation functional auditors, 4) increase in the number of budget for the SPIP, and 5) monitoring and to evaluate the performance of SPIP .

Keywords: audit, internal control, general election commission, government internal control system